

DETERMINAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA DARI PERSPEKTIF TEORI KEAGENAN

Klarista Dwi Chintya¹, Evi Maria²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia

e-mail: klaristadwic@gmail.com¹, evi.maria@uksw.edu²

Diterima: 17-07-2023 Disetujui: 27-09-2023

Abstrak

Riset ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) basis akrual dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Salatiga. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner. Total sampel riset ini sebanyak 131 orang pegawai Bagian Keuangan Dinas Daerah Pemerintah Kota Salatiga yang tersebar di 31 Organisasi Perangkat Daerah. Data dianalisis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil riset menemukan bukti empiris bahwa penerapan SAP berbasis akrual dan kompetensi SDM memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Salatiga. Semakin baik penerapan SAP berbasis akrual, maka akan semakin tinggi kualitas laporan keuangan, dan sebaliknya. Semakin baik kompetensi SDM, maka akan semakin baik kualitas laporan keuangan, dan sebaliknya. Oleh sebab itu, pemerintah Kota Salatiga perlu secara konsisten menerapkan SAP berbasis akrual dan terus meningkatkan kompetensi SDM Bagian Keuangannya, agar agen, yaitu pemerintah Kota Salatiga dapat menyajikan informasi keuangan yang berkualitas kepada prinsipal, yaitu masyarakat.

Kata kunci: Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi SDM, Kualitas Laporan Keuangan, Teori Keagenan

Abstract

This research aims to examine the effect of implementing accrual-based Government Accounting Standards and human resource competency on the quality of Salatiga City regional government financial reports. Data collection was carried out using a questionnaire. The total sample for this research was 131 employees of the Finance Department of the Regional Office of the Salatiga City Government spread across 31 Regional Apparatus Organizations. Data were analyzed using multiple regression analysis. The research results found empirical evidence that the implementation of accrual-based government accounting standards and HR competency has a positive influence on the quality of the Salatiga City government's financial reports. The better the implementation of accrual-based government accounting standards, the higher the quality of financial reports, and vice versa. The better the HR competency, the better the quality of financial reports, and vice versa. Therefore, the Salatiga City government needs to consistently implement accrual-based government accounting standards and continue to improve the competency of its Finance Department human resources, so that agents, namely the Salatiga City government, can present quality financial information to principals, namely the public.

Keywords : Government Accounting Standards, Competence of human resources, Quality of Financial Statements, Agency Theory

Pendahuluan

Laporan keuangan berkualitas, ketika informasi yang disajikan telah lengkap dan memenuhi kebutuhan para penggunanya (Yesiariani & Rahayu, 2017). Ini yang mendorong perlunya pemerintah perlu mengelola keuangan secara akuntabel (Ridzal *et al.*, 2022). Pemerintah daerah diberi kebebasan untuk mengelola keuangannya secara mandiri, namun pelaporan keuangannya harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan, seperti yang diamanatkan dalam PP No. 71/2010. Pelaporan yang transparan dan akuntabel dilakukan untuk mencegah terjadi praktik korupsi di sana. Tetapi dalam pelaksanaannya, Biro Keuangan Sekretariat Daerah masih menemukan permasalahan mengenai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang tidak akurat, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang kurang informatif, walaupun telah memperoleh Opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (Pradono & Basukianto, 2015; Ikriyati & Aprila, 2019). Opini WTP juga tidak menjamin pemerintah daerah bebas dari korupsi, seperti yang terjadi di Tegal yang melibatkan Walikotanya, yaitu Ikmal Jaya dan Klaten yang melibatkan Bupati, yaitu Sri Hartini. Ini artinya, pengelolaan keuangan daerah masih menjadi permasalahan serius di Indonesia.

Riset tentang determinan kualitas laporan keuangan sudah banyak dilakukan di Indonesia, seperti riset yang dilakukan oleh Wati *et al.*, (2014), Pradono & Basukianto (2015), Suarmika & Suputra (2016), Mokoginta *et al.* (2017), Sihite & Holiawati (2017), Syahrani (2017), Pujanira & Taman (2017), Mahardini & Miranti, 2018, Gamayuni (2018), Chodijah & Hidayah (2018), Putra & Rahayu (2019), Yulistyawati *et al.* (2019), Ikriyati & Aprila (2019), Sari & Fadli (2019), Darmawan (2019), Jati (2019), Dewi & Hoesada (2020), Mukaromah & Ari (2021), dan Ridzal *et al.* (2022). Riset terdahulu meneliti peran dari Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD), penggunaan teknologi informasi, sistem pengendalian internal, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Menariknya, riset Gamayuni (2018) dan Dewi & Hoesada (2020) menemukan tidak adanya pengaruh penerapan SAP pada kualitas laporan keuangan di pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat (Gamayuni, 2018) dan di Pemerintah Provinsi Lampung (Dewi & Hoesada, 2020). Padahal tujuan penerapan SAP berbasis akrual adalah untuk menghasilkan laporan yang berkualitas karena sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang mengakui transaksi saat terjadinya, tanpa memperhatikan aliran kas/setara kas diterima (KSAP, 2021). Perubahan metode akuntansi dari basis kas ke akrual dilakukan dalam rangka mengatasi kelemahan metode akuntansi basis kas. Informasi keuangan yang dihasilkan dari metode akuntansi basis akrual lebih akurat untuk menggambarkan biaya operasi yang sesungguhnya, dan menghasilkan informasi yang dapat diandalkan tentang utang dan piutang di instansi pemerintah (Nirmala *et al.*, 2014; Ferryono & Sutaryo, 2016). Ini artinya, riset untuk meneliti determinan kualitas laporan keuangan masih menarik untuk dilakukan.

Kota Salatiga mulai menerapkan perubahan basis kas ke akrual dalam pelaporan keuangannya, sejak tahun 2015. Kota ini mengalami peningkatan opini audit atas laporan keuangannya. Awalnya, yaitu tahun 2012-2015 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), kemudian sejak tahun 2016-2021 menjadi WTP. Adanya peningkatan opini audit tersebut, menyisakan pertanyaan riset. Apakah penerapan SAP berbasis akrual di pemerintah Kota Salatiga memiliki peran pada peningkatan kualitas laporan keuangan? ataukah ada faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan di pemerintah Kota Salatiga, seperti kompetensi sumber daya manusia (SDM), sebagai pengelola keuangan disana. SDM yang kompeten akan bekerja dengan pengetahuan dan keterampilan, sehingga dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien, efektif, dan ekonomis (Pujanira & Taman, 2017; Yulanda & Oktala, 2021). Pengalaman SDM yang kompeten dapat meminimalisir

kesalahan serta mendukung ketepatan waktu pembuatan laporan keuangan (Pujanira & Taman, 2017). Riset untuk meneliti determinan kualitas laporan keuangan di pemerintah Kota Salatiga, belum pernah dilakukan. Selama ini, riset di pemerintah Kota Salatiga hanya meneliti kinerja keuangan daerah, seperti yang dilakukan oleh Susanti *et al.* (2017) dan Purwanti & Noviyanti (2021). Oleh sebab itu, tujuan riset ini adalah menemukan bukti empiris pengaruh penerapan SAP basis akrual dan kompetensi SDM pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Salatiga.

Riset ini menggunakan teori keagenan untuk menjelaskan tentang determinan kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Salatiga. Teori keagenan menggambarkan probabilitas terjadinya konflik antara agen dan prinsipal, sehingga perlu mekanisme pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan untuk meminimalkan dan/atau menghilangkan konflik dan asimetri informasi (Jensen & Meckling, 1976). Hubungan keagenan juga muncul dalam organisasi sektor publik, seperti pemerintah daerah (Maria & Halim, 2021). Agen, yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas melakukan kegiatan pengelolaan keuangan daerah dan layanan publik, sedangkan prinsipal, yaitu masyarakat. Kepentingan agen dan prinsipal tidak selalu selaras, maka prinsipal menuntut agen untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas (Ikriyati & Aprila, 2019; Ridzal *et al.*, 2022) dan laporan tersebut harus bebas dari *fraud* (Primadhany & Puspaningsih, 2018). Kondisi ini sesuai dengan amanat PP No 22/PMK.05/2022 bahwa laporan keuangan pemerintah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Agen akan mengurangi konflik keagenan jika menyajikan laporan keuangan sesuai aturan dan standar akuntansi (Sihite & Holiawati, 2017; Primadhany & Puspaningsih, 2018; Jati, 2019).

Penyusunan laporan keuangan yang berkualitas membutuhkan standar akuntansi sebagai pedomannya. Standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual merupakan pedoman penyajian laporan keuangan pemerintah seperti yang diamanatkan dalam PP No. 71/2010. Menurut teori keagenan, agen, yaitu pemerintah daerah memiliki tanggungjawab kepada prinsipal, yaitu masyarakat untuk mengelola keuangan dan melakukan pertanggungjawaban dengan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas agar konflik keagenan dapat diminimalisir dan/atau dihilangkan (Maria & Halim, 2021). Agen yang baik akan menyajikan laporan keuangan sesuai aturan dan SAP dalam rangka menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas di sana (Sihite & Holiawati, 2017; Primadhany & Puspaningsih, 2018; Jati, 2019). Informasi keuangan pemerintah yang berkualitas bermanfaat untuk mengambil keputusan yang baik secara ekonomi, sosial, maupun politik (Pujanira & Taman, 2017; Karsana & Suaryana, 2017; Fauziah *et al.*, 2022; Lantu *et al.*, 2023).

Penerapan SAP di lingkungan pemerintahan merupakan kunci dari transparansi dan akuntabilitas di sana (Ikriyati & Aprila, 2019). SAP berbasis akrual berisi kerangka konseptual akuntansi pemerintahan yang berguna bagi instansi pemerintah menyajikan peristiwa ekonomi secara wajar. Riset terdahulu menemukan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah ditentukan oleh penerapan SAP (Syahrani, 2017; Sihite & Holiawati, 2017; Pujanira & Taman, 2017; Mahardini & Miranti, 2018; Ikriyati & Aprila, 2019; Sari & Fadli, 2019; Jati, 2019; Darmawan, 2019; Mukaromah & Ari, 2021). Ini karena penerapan SAP berbasis akrual berdampak pada peningkatan akurasi informasi keuangan dalam menggambarkan biaya operasional yang sesungguhnya, dan menghasilkan informasi yang dapat diandalkan tentang utang dan piutang di instansi pemerintah (Ferryono & Sutaryo, 2016; Pujanira & Taman, 2017; Mahardini & Miranti, 2018; Jati, 2019; Yulanda & Oktala, 2021). Dengan demikian, laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun dan disajikan berdasarkan SAP berbasis akrual dapat menghasilkan informasi yang lebih komprehensif untuk pengambilan keputusan (Jati,

2019; Lantu et al., 2023). Oleh sebab itu, untuk menguji pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan basis akrual pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, maka hipotesis riset ini dinyatakan, sebagai berikut ini.

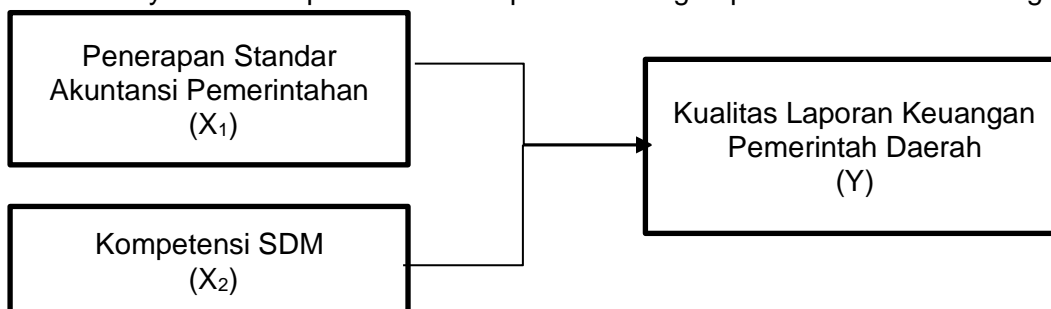
H₁: Penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Salatiga.

Teori keagenan merupakan teori yang menggambarkan hubungan keagenan dalam organisasi, tak terkecuali di organisasi sektor publik. Pemerintah daerah sebagai agen memiliki tanggung jawab untuk mengurus dan mengelola keuangan negara serta mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara, yang disampaikan melalui laporan keuangan (Jati, 2019; Maria & Halim, 2021). Pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara, didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Sihite & Holiawati, 2017). Kompetensi SDM merupakan kemampuan yang dimiliki seorang pegawai yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menyelesaikan kinerjanya sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan (Hutapea & Thoha, 2008; Pujanira & Taman, 2017; Yulanda & Oktala, 2021). Riset terdahulu menemukan bahwa kompetensi SDM berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah (Pujanira & Taman, 2017; Mahardini & Miranti, 2018; Yulanda & Oktala, 2021). Ini karena SDM yang kompeten akan bekerja dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya, sehingga dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien, efektif, dan ekonomis (Pujanira & Taman, 2017; Yulanda & Oktala, 2021). Kompetensi SDM yang memadai memudahkan dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas yang memenuhi karakteristik kualitatif, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Yulanda & Oktala, 2021). SDM yang kompeten dapat meminimalisir kesalahan serta berperan penting untuk mendukung ketepatan waktu pembuatan laporan keuangan di instansi pemerintahan (Pujanira & Taman, 2017; Mahardini & Miranti, 2018). Oleh sebab itu, untuk menguji pengaruh kompetensi SDM pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, maka hipotesis riset ini dinyatakan, sebagai berikut ini.

H₂: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Salatiga.

Model Penelitian

Model riset ini disajikan pada Gambar 1. Model teoritis ini dibangun untuk menguji pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan kompetensi sumber daya manusia pada kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Salatiga.



Gambar 1 Model Penelitian

Metode

Riset ini menggunakan jenis penelitian kasuatif, yaitu riset yang bertujuan untuk melihat hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen (Mukaromah & Ari, 2021). Riset ini menggunakan teknik analisis kuantitatif. Teknik ini dipilih untuk digunakan karena angka statistik dapat digunakan untuk menjelaskan variabel dan sampel yang dikumpulkan untuk menjelaskan obyek yang diteliti sesuai dengan tujuan riset (Sugiyono, 2018). Populasi riset ini, adalah pegawai Bagian Keuangan Dinas Daerah Pemerintah Kota Salatiga. Metode *purposive sampling* dipilih digunakan dalam pengambilan sampel dalam riset ini. Kriteria pemilihan sampel riset ini adalah seluruh pegawai aktif di Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah. Kriteria ini dipilih karena pegawai Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah terlibat langsung dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Total sampel riset ini adalah 131 orang. Riset ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui pengisian kuesioner oleh responden dan wawancara. Penyebaran dan pengisian kuesioner riset ini dilakukan secara *offline* melalui lembar kuesioner. Lembar kuesioner akan dikirimkan ke alamat kantor masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Data diperoleh dari Bagian Umum dan Kepegawaian Pemerintah Kota Salatiga. Responden diminta untuk mengisi lembar kuesioner dan menyerahkannya kembali. Riset ini juga menggunakan data sekunder, yaitu laporan keuangan pemerintah Kota Salatiga untuk memperkaya pembahasan.

Variabel dependen riset ini adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif yang disyaratkan oleh SAP, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (KSAP, 2020). Kualitas laporan keuangan diukur menggunakan indikator kualitas keuangan yang dikembangkan oleh (KSAP, 2021), yaitu 1) relevan, jika informasi memiliki manfaat umpan sbalik, manfaat prediksi masa yang akan datang, tepat waktu, dan lengkap; 2) andal, jika informasi disajikan secara jujur, dapat diverifikasi, dan netral; 3) dapat dibandingkan dengan pelaporan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya; dan 4) dapat dipahami. Adapun pernyataan untuk mengukur indikator kualitas keuangan laporan keuangan daerah riset ini dikembangkan dari riset Yulanda & Oktala (2021). Kualitas laporan keuangan daerah diukur menggunakan skala *likert* 4. Skor 1 untuk Sangat Tidak Setuju (STS), skor 2 untuk Tidak Setuju (TS), skor 3 untuk Setuju (S), dan skor 4 untuk Sangat Setuju (SS).

Ada dua variabel independen riset ini. Pertama, penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual. SAP berisi prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan di instansi pemerintah Indonesia (KSAP, 2021). Riset ini menggunakan SAP tahun 2020 tentang pelaporan keuangan daerah berbasis akrual. KSAP (2020) mengatur kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, antara lain PSAP No. 01 Penyajian Laporan Keuangan, PSAP No. 02 Laporan Realisasi Anggaran berbasis Kas, PSAP No. 03 Laporan Arus Kas, PSAP No. 04 Catatan atas laporan keuangan, PSAP No. 05 Akuntansi Persediaan, PSAP No. 06 Akuntansi Investasi, PSAP No. 07 Akuntansi Aset Tetap, PSAP No. 08 Akuntansi Kontruksi dalam pengerjaan, PSAP No. 09 Akuntansi Kewajiban, PSAP No. 10 Koreksi kesalahan, PSAP No. 11 Laporan Keuangan Konsolidasian, PSAP No. 12 Laporan Operasional, PSAP No. 13 Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, PSAP No. 14 Akuntansi Aset Tak Berwujud dan PSAP No. 15 Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan. Kerangka konseptual ini digunakan sebagai indikator dari penerapan SAP berbasis akrual dalam riset ini. Setiap pernyataan untuk mengukur indikator penerapan SAP berbasis akrual menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Pujanira & Taman (2017). Namun demikian, Pujanira & Taman (2017) mengembangkan kuesioner masih menggunakan SAP tahun 2016, yaitu PSAP No. 01 sampai dengan PSAP

No. 12. Riset ini menambahkan pernyataan untuk PSAP No. 13 sampai dengan PSAP No. 15. Variabel penerapan SAP berbasis akrual diukur menggunakan skala *likert* 4, yaitu Sangat Tidak Setuju (STS) dengan skor 1, Tidak Setuju (TS) dengan skor 2, Setuju (S) dengan skor 3, dan Sangat Setuju (SS) dengan skor 4.

Kedua, kompetensi sumber daya manusia (SDM), merupakan kemampuan yang dimiliki seorang pegawai yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menyelesaikan kerjanya sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan (Pujanira & Taman, 2017). Kompetensi SDM merupakan kemampuan yang dimiliki seorang pegawai yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menyelesaikan kerjanya sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan (Hutapea & Thoha, 2008; Wati *et al.*, 2014; Pujanira & Taman, 2017; Yulanda & Oktala, 2021). Ada tiga indikator pembentuk kompetensi sumber daya manusia, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan perilaku kerja. Setiap indikator diukur menggunakan pernyataan yang dikembangkan dalam riset Rovieyanti (2012). Variabel kompetensi SDM diukur menggunakan skala *likert* 4, yaitu Sangat Tidak Setuju (STS) dengan skor 1, Tidak Setuju (TS) dengan skor 2, Setuju (S) dengan skor 3, dan Sangat Setuju (SS) dengan skor 4.

Ada tiga analisis dalam riset ini. Pertama, uji kualitas data, terdiri atas uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dilakukan untuk mengukur validitas setiap pernyataan kuesioner riset menggunakan *Pearson Product Moment*. Jika nilai Sig.<0,05, maka butir pernyataan kuesioner tersebut *valid*, dan sebaliknya. Jika nilai Sig.>0,05, maka butir pernyataan kuesioner dianggap tidak *valid*. Sedangkan, uji reliabilitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui konsistensi kuesioner yang digunakan dalam riset ini. Pernyataan kuesioner dinyatakan reliabel jika *Cronbach's Alpha*>0,6, namun jika *Cronbach Alpha*<0,6 dinyatakan tidak reliabel. Kedua, uji asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal menggunakan *Kolmogorov-Smirnov Test*. Jika nilai Sig.>0,05, maka data berdistribusi normal, dan sebaliknya (Syahrani, 2017). Uji multikolinieritas untuk mendeteksi gejala kolerasi antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain. Jika VIF<10 dan nilai *tolerance* >0,10 maka tidak terdapat multikolinieritas dalam penelitian tersebut (Pujanira & Taman, 2017). Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika nilai Sig.uji-t>0,05, maka model regresi bebas dari uji heteroskedastisitas dan sebaliknya. Ketiga, uji hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda, yaitu uji t dilakukan untuk melihat pengaruh penerapan SAP basis akrual dan kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Salatiga. Hipotesis didukung jika nilai Sig.<0,05, dan hipotesis tidak didukung jika nilai Sig.>0,05. Model regresi linear berganda yang akan diuji dalam riset ini sesuai dengan yang disajikan pada persamaan 1.

$$KLKD_i = \beta_0 + \beta_1 PSAP_i + \beta_2 KSDM_i + \varepsilon_i \dots \dots \dots (1)$$

KLKD yaitu kualitas laporan keuangan daerah, *i* yaitu pemerintah daerah Kota Salatiga, β_0 yaitu konstanta, β_{1-2} yaitu koefisien variabel independen yakni PSAP adalah penerapan standar akuntansi pemerintahan, KSDM adalah kompetensi sumber daya manusia, ε adalah variabel pengganggu.

Hasil dan Pembahasan

Uji validitas menggunakan *Person Product Moment*, sedangkan uji reliabilitas menggunakan *Cronbach's Alpha*. Riset ini menggunakan 10 butir pernyataan untuk mengukur variabel kualitas laporan keuangan, 33 butir pernyataan untuk mengukur variabel SAP

berbasis akrual, dan 10 butir pernyataan untuk mengukur variabel kompetensi SDM. Jadi, uji validitas dilakukan pada 53 butir pernyataan kuesioner dan menemukan bahwa seluruh butir pernyataan riset memiliki nilai $Sig.<0,05$. Ini artinya, setiap butir pernyataan *valid* untuk mengukur variabel riset ini, dan dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya. Tabel 1 menunjukkan hasil uji reliabilitas. Pernyataan kuesioner dikatakan reliabel jika *Cronbach's Alpha* $>0,6$. Hasil uji menunjukkan besarnya nilai *Cronbach's Alpha* masing-masing variabel adalah sebesar $0,88-0,959>0,6$, yang berarti bahwa item pernyataan kuesioner riset ini adalah reliabel.

Tabel 1 Hasil Uji Reliabilitas

| Variabel | Cronbach's Alpha | Item Pernyataan | Keterangan |
|---|------------------|-----------------|------------|
| Kualitas Laporan Keuangan Daerah Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual | 0,88 | 10 | Reliabel |
| Kompetensi Sumber Daya Manusia | 0,959 | 33 | Reliabel |
| | 0,952 | 10 | Reliabel |

Sumber: Data Primer yang Diolah (2023)

Riset ini menggunakan uji asumsi klasik, seperti uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Uji normalitas menggunakan *Kolmogorov-Smirnov Test*. Jika nilai $Sig.>0,05$, maka data tersebut berdistribusi normal. Hasil pengujian normalitas diperoleh nilai $Sig.$ sebesar $0,253>0,05$ yang menunjukkan data riset ini terdistribusi normal. Uji multikolinearitas menggunakan VIF, jika $VIF<10$ dan nilai *tolerance* $>0,10$, maka tidak terjadi gejala multikolinearitas. Hasil pengujian menemukan nilai *tolerance* variabel standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sebesar $0,356$ dan nilai VIF sebesar $2,808$ serta nilai *tolerance* variabel kompetensi sumber daya manusia sebesar $0,356$ dan nilai VIF sebesar $2,808$. Ini berarti seluruh variabel riset ini, tidak terjadi gejala multikolinearitas. Sedangkan, uji heteroskedastisitas menggunakan *uji glejser*. Hasil pengujian ditemukan nilai $Sig.$ dari variabel SAP berbasis akrual ($0,500$) dan kompetensi SDM ($0,306$) memiliki nilai $Sig.>0,05$ maka model regresi dinyatakan bebas dari gejala heteroskedastisitas.

Hipotesis riset ini diuji menggunakan analisis regresi linear berganda dengan uji t. Tujuannya untuk melihat pengaruh penerapan SAP basis akrual dan kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan daerah Kota Salatiga. Tabel 2 menyajikan hasil pengujian hipotesis. Hasil pengujian H_1 diperoleh t-hitung variabel SAP berbasis akrual sebesar $3,428$ dan nilai $Sig.$ sebesar $0,001$. Nilai $Sig.$ variabel SAP berbasis akrual $<0,05$, memiliki arti bahwa penerapan SAP berbasis akrual berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Salatiga, sehingga H_1 terdukung. Korelasi positif antara SAP berbasis akrual dan kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Salatiga memiliki arti bahwa semakin baik penerapan SAP berbasis akrual, maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Salatiga yang disajikan.

Hasil pengujian H_2 diperoleh t-hitung untuk variabel kompetensi SDM sebesar $6,322$ dan nilai $Sig.$ sebesar $0,000$. Nilai $Sig.$ variabel kompetensi SDM $<0,05$ memiliki arti bahwa kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Salatiga, sehingga H_2 terdukung. Korelasi positif antara kompetensi SDM dan kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Salatiga memiliki arti bahwa semakin tinggi kompetensi SDM, maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Salatiga yang disajikan.

Tabel 2. Hasil Pengujian Hipotesis

| Variabel | B | t-hitung | Sig. | Keterangan |
|---|-------|----------|-------|------------|
| (Constant) | 6,676 | 3,569 | 0,001 | |
| Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua | 0,88 | 3,428 | 0,001 | Terdukung |
| Kompetensi Sumber Daya Manusia | 0,521 | 6,322 | 0,000 | Terdukung |

R^2 : 0,655
*Adjusted R*² : 0,650
Signifikan: 0,05

Sumber Data: Data Primer yang Diolah (2023)

Hasil pengujian juga menemukan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,655. Hal tersebut memiliki arti bahwa variabel independen riset, yaitu SAP berbasis akrual dan kompetensi SDM, secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen, yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Salatiga sebesar 0,655, dan sisanya, yaitu sebesar 0,345 dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam riset ini, seperti sistem pengendalian internal, teknologi informasi, dan faktor lainnya. Sedangkan, nilai *adjusted R*² menunjukkan angka sebesar 0,650. Artinya, penerapan SAP berbasis akrual dan kompetensi SDM berpengaruh sebesar 65 persen pada kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Salatiga, adalah sebesar 64,5 persen dan sisanya 35,5 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang ada di luar riset ini.

Pembahasan

Hasil pengujian menemukan bahwa hipotesis 1 riset ini, didukung oleh bukti empiris. Penerapan SAP berbasis akrual memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Salatiga. Ini artinya, semakin baik penerapan SAP berbasis akrual maka semakin baik juga kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Salatiga, dan begitupun sebaliknya. Semakin rendah penerapan SAP berbasis akrual, maka akan semakin rendah pula kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Salatiga. Temuan dari riset ini sejalan dengan temuan riset Syahrani (2017), Sihite & Holiawati (2017), Pujanira & Taman (2017), Mahardini & Miranti (2018), Ikriyati & Aprila (2019), Sari & Fadli (2019), Jati (2019), Darmawan (2019), Mukaromah & Ari (2021). Penerapan SAP basis akrual menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik (Syahrani, 2017; Ikriyati & Aprila, 2019; Jati, 2019).

Pemerintah Kota Salatiga sebagai agen melakukan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kepada prinsipal, yaitu masyarakat dengan menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan SAP berbasis akrual, seperti yang diamanatkan dalam PP No. 71/2010. Konflik keagenan akan berkurang, jika agen menyajikan laporan keuangan sesuai aturan dan SAP (Sihite & Holiawati, 2017; Primadhany & Puspaningsih, 2018; Jati, 2019). Kesesuaian penyajian laporan keuangan pemerintah dengan aturan dan SAP juga diawasi oleh pihak independen, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan melakukan proses pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah. Akurasi informasi keuangan dalam menggambarkan kinerja keuangan di instansi pemerintah semakin meningkat, jika pemerintah daerah menerapkan metode akuntansi berbasis akrual daripada basis kas (Ferryono & Sutaryo, 2016; Pujanira & Taman, 2017; Mahardini & Miranti, 2018; Jati, 2019; Yulanda & Oktala, 2021). Informasi keuangan yang disajikan dari penerapan SAP berbasis akrual di pemerintah Kota Salatiga telah memenuhi karakteristik kualitatif informasi berkualitas, yaitu

relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Informasi tersebut berguna tidak hanya bagi agen, tetapi juga bagi para prinsipal untuk pembuatan keputusan (Pujanira & Taman, 2017; Karsana & Suaryana, 2017; Fauziah *et al.*, 2022; Lantu *et al.*, 2023).

Hasil pengujian menemukan bahwa hipotesis 2 riset ini, didukung oleh bukti empiris. Kompetensi SDM memiliki pengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Salatiga. Ini artinya, semakin baik kompetensi SDM yang dimiliki, maka laporan keuangan pemerintah Kota Salatiga semakin berkualitas, dan begitupun sebaliknya. Semakin rendah kompetensi SDM, maka akan semakin rendah kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Salatiga. Riset ini sejalan dengan temuan riset oleh Pujanira & Taman (2017), Mahardini & Miranti (2018), Yulanda & Oktala (2021). Sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten akan bekerja dengan pengetahuan dan pengalamannya untuk meminimalisir kesalahan penyajian laporan keuangan (Mahardini & Miranti, 2018) dan menyajikan laporan keuangan secara efektif dan efisien (Pujanira & Taman, 2017; Sihite & Holiawati, 2017; Yulanda & Oktala, 2021). Laporan keuangan yang berkualitas di pemerintah daerah harus disajikan sesuai dengan amanat PP No. 71/2010. Oleh sebab itu, pemerintah membutuhkan SDM kompeten untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Penyajian laporan keuangan, merupakan bentuk pertanggungjawaban agen, yaitu pemerintah daerah kepada prinsipal, yaitu masyarakat (Jati, 2019; Maria & Halim, 2021).

Kesimpulan dan Saran

Riset ini menemukan bukti empiris penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Salatiga. Ini artinya, bahwa semakin baik penerapan SAP berbasis akrual, maka akan semakin tinggi kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Salatiga, dan sebaliknya. Semakin baik kompetensi SDM, maka akan semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Salatiga, dan sebaliknya. Dari perspektif teori keagenan, pemerintah berperan sebagai agen, memiliki tanggung jawab untuk mengelola keuangan negara serta mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara dalam bentuk laporan keuangan yang berkualitas kepada prinsipal, yaitu masyarakat.

Implikasi praktis riset ini ada dua. Pertama, laporan keuangan yang berkualitas dapat dihasilkan jika pemerintah Kota Salatiga secara konsisten menerapkan SAP berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangannya. Kedua, laporan keuangan yang berkualitas hanya dapat dihasilkan oleh SDM yang kompeten, yaitu SDM yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang akuntansi serta perilaku kerja yang baik. Oleh sebab itu, SDM bidang akuntansi dan keuangan di pemerintah Kota Salatiga perlu ditingkatkan kompetensinya secara berkala. Riset ini memiliki keterbatasan, hanya meneliti pemerintah daerah di Kota Salatiga, padahal fenomena tentang kualitas laporan keuangan juga terjadi di pemerintah daerah lainnya di Indonesia. Kondisi ini membuat hasil riset ini tidak dapat digeneralisasi pada seluruh pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, riset mendatang perlu untuk memperluas sampelnya ke pemerintah daerah lain, sehingga hasil riset dapat digeneralisasi untuk konteks pemerintah daerah di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Chodijah, S., & Hidayah, N. (2018). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus SKPD Provinsi DKI Jakarta). *TEKUN: Jurnal Telaah Akuntansi Dan Bisnis*, 9(1), 34–48. <https://doi.org/10.22441/tekun.v8i1.2595>
- Darmawan, E. (2019). The Effect of Government Accounting Standards and Government

- Internal Control Systems on the Quality of Local Government Financial Statements. *JASS (Journal of Accounting for Sustainable Society)*, 1(02), 108–111.
- Dewi, R., & Hoesada, J. (2020). The Effect Of Government Accounting Standards, Internal Control Systems, Competence Of Human Resources, And Use Of Information Technology On Quality Of Financial Statements. *International Journal of Innovative Research and Advanced Studies (IJIRAS)*, 7(01), 1-10.
- Fauziah, F. N., Bakker, C. C., Daymiliana, & Yunibere. (2022). Decision Usefulness Approach To Financial Reporting. *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 2962–8202.
- Ferryono, B., & Sutaryo. (2016). Manfaat Basis AkruaL Dan Basis Kas Menuju AkruaL Dalam Pengambilan Keputusan Internal Pemerintah Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi XIX*.
- Gamayuni, R. R. (2018). The effect of internal audit function effectiveness and implementation of accrual based government accounting standard on financial reporting quality. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 7(1), 46–58.
- Hutapea, P., & Thoha, N. (2008). *Kompetensi Plus: Teori, Desain, Kasus dan Penerapan untuk HR dan Organisasi yang Dinamis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ikriyati, T., & Aprilia, N. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 131–140.
- Jati, B. P. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Wahana*, 22(1), 1–14.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Karsana, I. W., & Suaryana, I. G. N. A. (2017). Pengaruh Efektivitas Penerapan Sap, Kompetensi Sdm, Dan Spi Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli. *E-Jurnal Akuntansi*, 21(1), 643–670.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2020). Standar Akuntansi Pemerintahan. *Komite Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2021). Standar Akuntansi Pemerintahan Republik Indonesia. In *Komite Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Lantu, F. T., Pangkey, R., & Sumampouw, O. (2023). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 4(1), 91–97.
- Mahardini, N. Y., & Miranti, A. (2018). Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015. *Jurnal Akuntansi : Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, 5(1), 22.
- Maria, E., & Halim, A. (2021). E-government dan Korupsi: Studi di Pemerintah Daerah, Indonesia dari Perspektif Teori Keagenan. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 5(1), 40–58.
- Mokoginta, N., Lambey, L., & Pontoh, W. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 874–890.
- Mukaromah, L., & Ari, P. (2021). Pengaruh Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada OPD Di Pemerintah Daerah

- Kabupaten Sambas). *Jurnal Sebi*, 4(02), 134–140.
- Nirmala, T. P., Alfian, M., & Sari, Y. P. (2014). Kegunaan Pelaporan Keuangan untuk Pembuatan Keputusan Internal: Studi pada Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan. *Journal of Accounting and Investment*, 15(1), 36–46.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 22/PMK.05/2022. *Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat*.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Pradono, F. C., & Basukianto. (2015). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor Yang Mempengaruhi Dan Implikasi Kebijakan (Studi Pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 22(2), 188–200.
- Primadhany, A. Y., & Puspaningsih, A. (2018). Analisis Determinan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi di Sektor Publik. *Behavioral Accounting Journal (BAJ)*, 1(1), 62–83.
- Pujanira, P., & Taman, A. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 6(2), 14-28.
- Purwanti, E., & Noviyanti, E. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2014-2018. *Jurnal Among Makarti*, 14(2), 1–12.
- Putra, M. A., & Rahayu, N. T. (2019). Analisis Fraud Diamond Theory Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. *Posiding Seminar Nasional Unimus*, 2, 240–248.
- Ridzal, N. A., Sujana, I. W., & Malik, E. (2022). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan. *Owner*, 6(3), 2944–2954.
- Rovieyanti, D. (2012). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Tasikmalaya. *E-Jurnal Universitas Silwangi*.
- Sari, G. I., & Fadli, F. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi*, 7(3), 17–34.
- Sihite, R. N., & Holiawati. (2017). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, SPI dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi & Investasi Aset (Akuntansi Riset)*, 9(2), 81–92.
- Suarmika, I. G. L., & Suputra, I. D. G. D. (2016). Kemampuan Komitmen Organisasi dan Sistem Pengendalian Intern Memoderasi Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Penerapan SIKD Pada Kualitas LKPD Kabupaten KarangAsem. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 5.9, 2921–2950.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (28th ed.). Alfabeta.
- Susanti, E., Raharjo, K., & Oemar, A. (2017). Analisis Rasio Laporan Keuangan APBD (Anggaran Pendapatan Daerah) sebagai Tolok Ukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2012-2016. *Ekonomi*, 1–16.
- Syahrani, F. (2017). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pengetahuan Pengelola, Ketersediaan Sarana Prasarana, dan Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi pada OPD Kota Pekanbaru). *JOM Fekom*, 5(1), 1-15.
- Wati, K. D., Herawati, N. T., & Sinarwati, N. K. (2014). Pengaruh Kompetensi SDM dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) UNDIKSHA*, 2(1).

- Yesiariani, M., & Rahayu, I. (2017). Deteksi financial statement fraud: Pengujian dengan fraud diamond. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 21(1), 49–60.
- Yulanda, D., & Oktala, R. (2021). Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Satuan Kerja Seksi Keuangan Polres. *Journal of Management and Business (JOMB)*, 1(2), 1–9.
- Yulistyawati, N. K. A., Suardikha, I. M. S., & Sudana, I. P. (2019). The analysis of the factor that causes fraudulent financial reporting with fraud diamond. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 23(1), 1–10.

Lampiran**Tabel Operasionalisasi Variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah**

| Variabel | Indikator | Pernyataan |
|--|---------------------------|---|
| Kualitas Laporan Keuangan Daerah (KLKD) | KLKD01 Relevan | <ol style="list-style-type: none">1. Laporan keuangan memberikan informasi yang dapat mengoreksi aktivitas keuangan masa lalu.2. Laporan keuangan memberikan informasi yang dapat memprediksi masa depan.3. Penyajian laporan keuangan tepat waktu sesuai periode akuntansi.4. Laporan keuangan memberikan informasi yang lengkap yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. |
| | KLKD02 Andal | <ol style="list-style-type: none">5. Laporan keuangan memberikan informasi yang akurat dan jujur tentang transaksi dan peristiwa keuangan lainnya yang harus dilaporkan.6. Informasi dalam laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan pihak tertentu. |
| | KLKD03 Dapat Dibandingkan | <ol style="list-style-type: none">7. Laporan keuangan menghasilkan informasi yang dapat dibandingkan dengan entitas lain yang menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.8. Laporan keuangan menghasilkan informasi yang dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya. |
| | KLKD04 Dapat Dipahami | <ol style="list-style-type: none">9. Informasi laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.10. Informasi laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipahami dengan jelas. |

Tabel Operasionalisasi Variabel Penerapan SAP berbasis Akrua

| Variabel | Indikator | Pernyataan |
|--|---|--|
| Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) | PSAP No.01 terkait Penyajian Laporan Keuangan | <ol style="list-style-type: none"> Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan prinsip dalam akuntansi yang dijadikan pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Instansi ini menggunakan basis akrual dalam pengakuan aset. Instansi ini menggunakan basis akrual dalam pengakuan kewajiban. Instansi ini menggunakan basis kas dalam pengakuan pendapatan dan belanja. |
| | PSAP No.02 terkait Laporan Realisasi Anggaran | <ol style="list-style-type: none"> Pencatatan pendapatan didasarkan pada asas bruto di instansi ini. Ketika terjadi pengeluaran dari rekening kas, diakui sebagai belanja pada instansi ini. Pada saat penerimaan pembiayaan akan diakui ketika kas diterima. |
| | PSAP No.03 terkait Laporan Arus Kas | <ol style="list-style-type: none"> Instansi ini melakukan penyusunan laporan arus kas yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dimana terbagi atas aktivitas operasi, pendanaan, dan investasi. Instansi ini menerapkan metode pelaporan arus kas operasi langsung. |
| | PSAP No.04 terkait Catatan Atas Laporan Keuangan PSAP No.05 terkait Akuntansi Persediaan | <ol style="list-style-type: none"> Catatan atas laporan keuangan disajikan pada setiap periode pelaporan di instansi ini. Catatan atas Laporan Keuangan terdiri atas penjelasan mengenai pos-pos yang ada dalam laporan keuangan. Instansi ini mengakui persediaan setelah penerimaan atau pengalihan kepemilikan. Persediaan dicatat berdasarkan persediaan fisik. |
| | PSAP No.06 terkait Akuntansi Investasi | <ol style="list-style-type: none"> Pengakuan kas yang dikeluarkan sebagai investasi setelah memenuhi kriteria untuk ketersediaan di masa yang akan datang dan nilai investasi dapat diukur pada instansi ini. Pencatat investasi didasarkan pada biaya kepemilikan permanen pada instansi ini. Instansi ini menerapkan metode nilai realisasi bersih dalam menilai investasi permanen. |
| | PSAP No.07 terkait Aset Tetap | <ol style="list-style-type: none"> Dalam pengklasifikasian aset tetap, didasarkan pada persamaan sifat atau fungsi dalam operasi entitas pada instansi ini. Pencatat aset tetap dilakukan sebesar biaya perolehan pada instansi ini. |

| | | |
|--|--|---|
| | PSAP No.08 terkait Akuntansi Kontruksi dalam Pengerjaan | 19. Penyajian informasi mengenai konstruksi dalam pengerjaan dilakukan pada akhir periode akuntansi pada instansi ini. 20. Pengakuan untuk kontruksi dalam pengerjaan diakui sebagai aset tetap ketika pengerjaan konstruksi telah selesai dilakukan pada instansi ini. |
| | PSAP No.09 terkait Akuntansi Kewajiban | 21. Pencatatan kewajiban dilakukan pada saat dana pinjaman telah diterima dan/atau pada saat kewajiban selesai dibuat pada instansi ini. 22. Pencatatan kewajiban pada instansi ini, didasarkan pada nilai nominal. |
| | PSAP No.10 terkait Koreksi Kesalahan | 23. Koreksi merupakan tindakan korektif yang dilakukan agar hal-hal yang disajikan sebagaimana mestinya. 24. Pengoreksian dilakukan atas kesalahan yang ditemukan pada instansi ini. |
| | PSAP No.11 terkait Laporan Keuangan Konsolidasi | 25. Penyajian laporan keuangan konsolidasi dapat dilakukan oleh instansi ini. 26. Seluruh laporan keuangan dari semua entitas akuntansi dicakup dalam laporan keuangan konsolidasi. |
| | PSAP No.12 terkait Laporan Operasional | 27. Laporan operasional selama periode akuntansi disusun dan disajikan dalam instansi ini. 28. Laporan operasional meliputi pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. |
| | PSAP No.13 terkait Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum | 29. Dinas ini menyusun laporan keuangan BLU yang disajikan dalam bentuk LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK. 30. Laporan keuangan BLU disusun dengan menerapkan akuntansi basis akrual. |
| | PSAP No. 14 terkait Akuntansi Aset Tak Berwujud | 31. Aset Tak Berwujud yang diperoleh dinilai berdasarkan biaya perolehannya. 32. Aset Tak Berwujud diakui jika dapat diidentifikasi, dikendalikan, dikuasai, dimiliki entitas, memiliki manfaat ekonomi, sosial atau jasa, dan biayara perolehannya dapat diukur dengan andal. |
| | PSAP No. 15 terkait Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan | 33. Peristiwa setelah tanggal pelaporan terjadi antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit yang menguntungkan maupun tidak menguntungkan. |

Tabel Operasionalisasi Variabel Kompetensi SDM

| Variabel | Indikator | Pernyataan |
|---------------------------------------|----------------------|---|
| Kompetensi Sumber Daya Manusia | Pengetahuan | <ol style="list-style-type: none">1. Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pencatatan, dan pelaporan peristiwa keuangan dari suatu organisasi/entitas, yang akan digunakan bagi pihak yang membutuhkan informasi dalam rangka pengambilan keputusan mengenai keuangan.2. APBD diperhitungkan dalam rekening perekonomian daerah.3. Persamaan dasar akuntansi pemerintahan adalah Aset – Kewajiban = Ekuitas Dana.4. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. |
| | Keterampilan | <ol style="list-style-type: none">5. Instansi ini mengikutsertakan pegawai pada pendidikan dan pelatihan (diklat) pegawai.6. Dalam hal peraturan baru dalam perekonomian daerah, pegawai di bidang keuangan dan akuntansi disosialisasikan dan/atau dilatih.7. Dalam hal peraturan baru dibidang akuntansi negara, pegawai dibagian keuangan/akuntansi menerima pelatihan dan sosialisai. |
| | Sikap/perilaku kerja | <ol style="list-style-type: none">8. Pelaksanaan tugas diselesaikan secara tepat waktu dan efektif.9. Bapak/Ibu memahami struktur organisasi pada Instansi/Dinas tempat Bapak/Ibu bekerja.10. Bapak/Ibu mematuhi kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil. |